



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 141 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI  
DARI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DAN KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK  
INDONESIA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi selaku pihak yang diberikan pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;

MEMUTUSKAN :

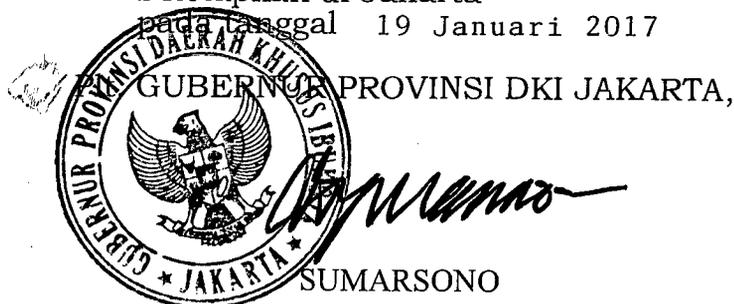
- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Dekonsentrasi;
  - b. menunjuk dan menetapkan Pemegang Uang Muka/Staf Pengelola;
  - c. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Barang serta Pengurus Barang Dana Dekonsentrasi;

- d. menunjuk dan menetapkan UAKPA/B (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang);
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas secara berkala kepada Kementerian pemberi dana Dekonsentrasi dan kepada Gubernur c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bersama Bendahara Pengeluaran menandatangani cek pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran;
- g. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan RKA-K/L yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- h. bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersangkutan; dan
- i. mengoordinir pengadaan barang dan jasa di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Januari 2017



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Ketenagakerjaan
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
7. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Wilayah Ditjen. Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I
15. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor 141 TAHUN 2017  
Tanggal 19 Januari 2017

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PROGRAM  
DANA DEKONSENTRASI DARI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DAN KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (Nama/NIP/NRK/Gol./Jabatan)
1	2	3
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Drs.Priyono, M.Si 195807101980031012/130035 Pembina Utama Muda/IV C Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Pt. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, P